



Belajar dari Kasus Meiliana

Oleh Olivia Lewi Pramesti



SM/dok

PENELITIAN The World's Most Literate Nations (WMLN) tentang tingkat literasi dunia 2016 menempatkan Indonesia pada urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia berada satu tingkat di atas Botswana, negara kecil di Benua Afrika yang berpenduduk 2,1 juta jiwa.

Meskipun tingkat literasi rendah, kecerewetan masyarakat Indonesia di media sosial tertinggi di dunia. Sepanjang 2016 lalu jumlah kicauan pengguna Twitter Indonesia mencapai 4,1 miliar. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan literasi yang baik. Berita bohong alias hoaks justru menjadi salah satu yang digemari. Banyak pengguna media sosial gampang terprovokasi dan hanyut dalam kabar bohong yang bersifat destruktif. Seperti pada kasus Meiliana, warga Tanjung Balai, Medan yang menjadi buah bibir akhir-akhir ini. Ia menjadi terdakwa kasus penistaan agama dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada Selasa, 21 Agustus lalu.

Kasus ini bermula saat Meiliana menyampaikan protes terhadap suara azan yang menggema di dekat rumahnya. Mediasi pun sudah berjalan baik namun ada pihak yang merasa tidak bisa menerima dan kabar yang tidak benar pun tersebar sampai akhirnya muncul aksi penyerangan dan perusakan rumah Meiliana dan sejumlah rumah ibadah.

Peristiwa tersebut mendapatkan respons beragam. Salah satunya dukungan pada Meiliana yang diwujudkan dalam petisi berjudul "Bebaskan Meiliana, Tegakkan Toleransi!". Petisi dikeluarkan situs *change.org* dan mendapat dukungan lebih 100.000 orang. Publik menyalahkan putusan hakim dan berharap pemerintah tegas dalam menyelesaikan kasus itu.

Kasus ini sensitif di Indonesia karena menyangkut persoalan agama sehingga menjadi perhatian masyarakat. Mengapa demikian? Banyak contoh memperlihatkan kasus yang menyerempet agama akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memancing emosi khalayak dengan cara menyebar informasi tidak sesuai fakta, melebih-lebihkan bahkan bohong. Perlu kekritisan (literasi media) dari masyarakat untuk memilih informasi yang benar. Tak hanya masyarakat, media pun harus turut berpartisipasi tidak memperuncing persoalan.

Kode Etik

Dalam kasus tersebut, media harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Media harus memberikan informasi yang seimbang pada semua pihak terutama yang berkaitan. Media perlu memperhatikan diksi agar tidak menyinggung satu pihak tertentu.

Tak hanya itu, media perlu berhati-hati memilih narasumber yang berbicara atas isu yang bersinggungan dengan agama. Pasalnya, ketika berita hoaks mewarnai di berbagai media sosial dan akan makin menyebar ketika media massa arus utama ikut memberitakan. Media perlu melakukan verifikasi atas berita hoaks dan tidak menjadikan hoaks sebagai sumber berita. Verifikasi mutlak dilakukan untuk kebenaran berita serta menciptakan iklim kondusif dan damai di masyarakat. Masyarakat perlu memilih informasi yang benar agar tidak menjadi korban provokasi media. Menangkal hoaks memang bukan perkara mudah. Situs jejaring sosial misalnya Facebook, Instagram, Line, Whatsapp, dan lainnya menjadi sasaran empuk bagi penyebar hoaks.

Untuk mengecek berita atau informasi bohong atau bukan, netizen perlu melakukan verifikasi di situs berita yang lain. Perlu pula pengecekan kelengkapan berita, memenuhi standar jurnalistik seperti adanya narasumber yang jelas dan kelengkapan unsur jurnalistik. Tak ada salahnya netizen menengok situs-situs berita arus utama yang sering menjadi rujukan masyarakat.

Di sinilah pentingnya literasi media yang menjadi tanggung jawab bersama, lebih lagi menyangkut masalah-masalah sensitif seperti kasus Meiliana. Literasi media bisa dimulai dari diri sendiri dengan kritis pada informasi yang beredar. Harapannya, netizen menjadi cerdas dan mampu memilih informasi secara bijak. Mari bantu Indonesia agar masyarakatnya semakin melek literasi sehingga menaikkan peringkatnya sebagai negara dengan literasi baik. (40)

— Olivia Lewi Pramesti, Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.